

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2019 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2019 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya yang terbagi kedalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD s.d triwulan II Tahun 2019 dengan pemredikatan sebagai berikut :

- Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 45% ($X > 45\%$);
- Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 37,5% sampai dengan 45% ($45\% \geq X > 37,5\%$);
- Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 32,5% sampai dengan 37,5% ($37,5\% \geq X > 32,5\%$);
- Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 25% sampai dengan 32,5% ($32,5\% \geq X > 25\%$); dan
- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 25% ($X \leq 25\%$)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang ,
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2019 sekaligus review terhadap target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan triwulan II.

A. URUSAN UMUM

Pencapaian kinerja fisik dan keuangan RKPD pada Urusan Umum sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Umum s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Umum	10.700.402.500	74.118.620.790	37,00	23.810.342.351	32,12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52.749.834.500	52.704.362.540	42,00	19.485.532.024	36,97
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	48.534.920.000	15.400.449.250	21,00	2.401.043.625	15,59
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.279.668.000	2.780.049.000	46,00	1.135.712.351	40,85
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.110.430.000	2.827.040.000	28,00	643.469.051	22,76
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	895.550.000	355.720.000	42,00	134.233.300	37,74
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	130.000.000	51.000.000	25,00	10.352.000	20,30

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 pada Urusan umum untuk kinerja keuangan secara rata-rata Rendah. Sedangkan kinerja fisiknya secara rata-rata Sedang sehingga kinerjanya perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Umum yang masih dihadapi adalah:

- 1) Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa, khususnya sarana prasarana fisik, serta SDM yang menguasai perencanaan masih terbatas;
- 2) Dalam pengelolaan barang milik negara masih terkendala dalam mengupdate kepemilikan barang kantor.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Diklat Perencanaan;
- 2) Melakukan evaluasi kepada pengurus barang untuk melaporkan setiap ada belanja modal.

B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Wajib Pendidikan

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pendidikan	145.424.094.000	94.201.315.350	25,00	14.174.855.814	15,04
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.918.000.000	3.481.130.000	17,98	103.666.251	2,98
8	Program Pendidikan Dasar	79.341.421.000	47.404.018.000	23,66	4.103.892.574	8,66
9	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	38.456.800.000	2.938.278.000	23,38	246.112.489	8,38
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.719.873.000	25.624.100.000	49,58	8.859.770.000	34,58
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	300.000.000	13.993.789.350	21,16	861.414.500	6,16
12	Program Penyusunan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Sastra Daerah	238.000.000	250.000.000	15,00	0	0,00
13	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	375.000.000	185.000.000	15,00	0	0,00
14	Program Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal	79.341.421.000	325.000.000	15,00	0	0,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 pada Urusan Pendidikan adalah Sangat Rendah sehingga perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang masih dihadapi adalah:

- 1) Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa, khususnya sarana prasarana fisik, serta Tenaga Pendidik/Kependidikan yang mempunyai kemampuan menangani siswa di sekolah reguler dan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi;
- 2) Untuk sekolah swasta dan Pendidikan Non Formal (Desa Vokasi, PKBM, Lembaga Kursus dll) terkendala dalam pelaksanaan hibah dan bansos.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, maupun bidang keahlian dalam penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus;
- 2) Mencari solusi dan menggunakan regulasi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan bagi Sekolah Swasta/Lembaga Pendidikan Non Formal.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019
pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
					(%)	(Rp)
	Kesehatan	305.442.168.600	194.397.800.900	50,00	87.643.158.223	45,08
15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	10.564.180.000	4.437.305.000	15,20	9.046.200	0,20
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	42.750.000.000	28.865.295.300	43,96	8.358.483.527	28,96
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	355.000.000	101.910.000	49,02	34.665.100	34,02
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	675.000.000	55.300.000	15,00	0	0,00
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	550.000.000	95.400.000	25,69	10.200.000	10,69
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	290.000.000	24.000.000	15,00	0	0,00
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.171.236.000	415.686.680	27,80	53.223.152	12,80
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	665.000.000	395.000.000	23,81	34.781.750	8,81
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	395.000.000	395.000.000	28,12	51.824.679	13,12
24	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	41.647.500.000	8.227.440.320	15,19	15.360.900	0,19
25	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	125.000.000	212.000.000	15,09	200.000	0,09
26	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	150.000.000	12.000.000	15,00	0	0,00
27	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	135.000.000	11.000.000	15,00	0	0,00
28	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	525.000.000	1.372.000.000	18,18	43.585.000	3,18
29	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	50.000.000	18.000.000	64,47	8.905.000	49,47
30	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas	44.917.652.600	49.040.767.600	38,68	11.615.053.893	23,68
31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno	105.000.000.000	100.000.000.000	82,41	67.407.829.022	67,41
32	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	54.476.600.000	719.696.000	15,00	0	0,00

Berdasarkan tabel di atas, kinerja fisik dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan kinerja keuangan dengan predikat Tinggi. Namun demikian secara umum perlu ditingkatkan capaiannya pada tahun selanjutnya adalah terkait dengan sarpras dan pelayanan kesehatan anak dan balita. Dalam pelayanan lansia, promosi kesehatan dan pengembangan lingkungan sehat harus terus didorong untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan 2 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	401.026.200.000	110.589.940.700	36,42	5.331.498.722	4,82
33	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	336.752.000.000	71.404.485.700	15,20	144.339.400	0,20
34	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	20.550.000.000	13.600.000.000	41,74	3.636.569.000	26,74
35	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	500.000.000	500.000.000	66,95	259.740.000	51,95
36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	800.000.000	650.000.000	34,45	126.419.072	19,45
37	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	14.960.000.000	17.278.300.000	15,20	35.301.350	0,20
38	Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.000.000.000	600.000.000	37,16	132.960.000	22,16
39	Program Pembangunan Sistem Informasi Irigasi	350.000.000	100.000.000	98,69	83.693.000	83,69
40	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	10.584.200.000	2.807.155.000	43,00	785.919.400	28,00
41	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	14.050.000.000	3.170.000.000	16,88	59.690.000	1,88
42	Program pembinaan jasa konstruksi	55.000.000	55.000.000	24,42	21.035.400	38,25
43	Program Perencanaan Tata Ruang	270.000.000	270.000.000	28,17	25.422.350	9,42
44	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	155.000.000	155.000.000	15,20	20.409.750	13,17

Berdasarkan tabel diatas, kinerja fisik Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih Sedang. Sedangkan kinerja keuangannya Sangat Rendah sehingga kinerja triwulan II pada tahun 2019 perlu ditingkatkan capaiannya. Beberapa capaian yang perlu ditingkatkan adalah proses pengadaan dalam pelaksanaan paker pekerjaan dan pekerjaan yang sudah selesai proses lelang, sudah mulai dilaksanakan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yaitu :

- 1) Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pegawai yang menangani pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- 2) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	30.320.735.000	14.714.682.000	19,75	113.308.090	0,77
45	Program Lingkungan Sehat Perumahan	12.705.000.000	6.401.447.000	15,66	42.279.900	0,66
46	Program Pengembangan Perumahan	16.545.735.000	7.623.235.000	15,82	62.358.210	0,82
47	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	120.000.000	100.000.000	32,37	7.804.480	7,80
48	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	950.000.000	590.000.000	15,15	865.500	0,15

Kinerja fisik maupun keuangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih Sangat Rendah. Pelaksanaan program di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada permasalahan kurangnya pemenuhan target penanganan RTLH dan pembangunan komunitas perumahan pada triwulan II tahun 2019. Hal ini disebabkan karena masih terkendala dalam pengadaan paket pekerjaan. Sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur permukiman antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang maupun antar Lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Pusat perlu ditingkatkan, sehingga Jumlah RTLH yang akan tertangani di tahun mendatang akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib
Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat s.d
Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	23.640.000.000	10.668.356.000	51,46	2.673.553.560	25,06
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.585.000.000	1.368.656.000	62,43	1.368.656.000	47,43
50	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	30.000.000	30.000.000	15,00	0	0,00
51	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	670.000.000	670.000.000	20,72	38.310.160	5,72
52	Program Penegakan Peraturan Daerah	703.000.000	690.000.000	51,46	251.594.100	5,72
53	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2.848.000.000	2.773.000.000	23,20	227.284.700	8,20
54	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.388.000.000	1.063.100.000	48,50	356.103.150	33,50
55	Program Pendidikan Politik Masyarakat	66.000.000	66.000.000	81,67	44.000.000	66,67
56	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	155.000.000	15.000.000	68,14	7.971.200	53,14
57	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	11.365.000.000	600.000.000	31,45	98.708.500	16,45
58	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	3.285.000.000	2.215.000.000	28,98	309.585.950	13,98
59	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.145.000.000	731.600.000	62,39	346.728.500	47,39
60	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	150.000.000	141.000.000	79,73	91.263.500	64,73
61	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	250.000.000	305.000.000	97,89	252.804.250	82,89

Secara umum kinerja fisik Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat masih Sangat Tinggi, untuk kinerja keuangannya Rendah. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) belum dilaksanakan karena belum dilakukan monitoring di wilayah-wilayah teridentifikasi Pekat. Sedangkan kondusifitas Kabupaten Rembang dinilai masih terjaga, terlihat tidak terjadi konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Meskipun demikian hal itu tidak berarti tidak diperlukan upaya-upaya untuk meredam meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kabupaten Rembang.

6. Urusan Wajib Sosial

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Sosial sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Sosial	6.235.400.000	2.292.374.000	46,10	503.101.340	21,95
62	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	280.000.000	199.000.000	36,22	42.229.240	21,22
63	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	4.017.400.000	393.000.000	16,98	7.776.050	1,98
64	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	70.000.000	235.000.000	28,53	31.788.050	13,53
65	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	80.000.000	45.274.000	57,93	19.435.000	42,93
66	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	20.000.000	20.000.000	15,00	0	0,00
67	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.059.000.000	850.000.000	25,74	91.261.000	10,74
68	Program Penanganan Anak Terlantar	200.000.000	200.000.000	101,35	172.700.000	86,35
69	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.000.000	38.100.000	41,56	10.119.000	26,56
70	Program Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin	210.000.000	99.000.000	104,15	88.262.000	89,15
71	Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	254.000.000	213.000.000	33,56	39.531.000	18,56

Kinerja fisik Urusan Sosial dalam kategori Sangat Tinggi. Untuk kinerja keuangannya masih Sangat Rendah. Yang menjadi kendala adalah Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) belum dilaksanakan.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut:

- 1) Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis;
- 2) Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PSK tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program / kegiatan;
- 3) Minimnya ketersediaan Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang (hanya satu) dengan keterbatasan daya tampung dan hanya sebagai penampungan bagi penderita cacat mental dan eks psikotik serta penampungan sementara PGOT dan anak jalanan yang terjaring razia/penertiban PMKS.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
- 2) Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan PSK) secara massif;

- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan PMKS yang terjaring razia/penertiban untuk ditempatkan pada balai-balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Tenaga Kerja	3.331.250.000	1.974.000.000	33,60	290.315.454,00	14,71
72	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.324.250.000	1.269.000.000	25,72	135.985.854	10,72
73	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	590.000.000	335.000.000	24,06	30.350.000	9,06
74	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	275.000.000	255.000.000	58,68	111.379.600	43,68
75	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	142.000.000	115.000.000	25,96	12.600.000	10,96

Secara umum kinerja fisik dan keuangan Urusan Ketenagakerjaan secara berurutan masih Sedang dan Sangat Rendah. Yang menjadi perhatian dalam Urusan Ketenagakerjaan adalah Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Urusan Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Sulitnya akses permodalan yang bagi perintis usaha.
2. Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai, untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.
3. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Memperluas jejaring, link and match antara dengan pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha agar bisa memperoleh permodalan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, serta peningkatan Sinergitas unsur tripartite
- 2) Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DPMPSTSPNAKER berusaha diversifikasi kegiatan dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/penganggur sesuai kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.497.000.000	1.770.000.000	31,64	442.628.760	25,00
76	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	175.000.000	100.000.000	15,00	0,00	0,00
77	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	365.000.000	400.000.000	20,16	20.627.000,00	5,16
78	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	550.000.000	460.000.000	74,38	273.159.400,00	59,38
79	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	185.000.000	90.000.000	35,56	18.500.000,00	20,56
80	Program Peningkatan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak	525.000.000	420.000.000	29,06	59.062.000,00	14,06
81	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	667.000.000	295.000.000	32,38	51.280.360,00	17,38
82	Program Sistem Data Gender dan Anak	30.000.000	5.000.000	15,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, kinerja fisik dan keuangannya secara berurutan adalah Rendah dan Sangat Rendah. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Masih perlunya pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Belum semua pemangku kepentingan mengenai kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Terus mengoptimalkan kegiatan kegiatan bersifat preventif dan promotif mengenai dampak hukum dan Psikologis pada Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Melakukan koordinasi mengenai sinkronisasi program Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

3. Urusan Wajib Pangan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada
Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pangan	1.834.000.000	1.287.454.173	26,51	192.633.500	15,05
83	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	30.000.000	20.000.000	15,00	0	0,00
84	Program Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan Daerah	100.000.000	35.000.000	15,00	0	0,00
85	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	60.000.000	15.000.000	40,67	3.850.000	25,67
86	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	514.000.000	302.454.173	75,04	181.580.400	60,04
87	Program Desa Mandiri Pangan	395.000.000	300.000.000	17,40	7.203.100	2,40
88	Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	655.000.000	570.000.000	15,00	0	0,00
89	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	50.000.000	15.000.000	15,00	0	0,00
90	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	30.000.000	30.000.000	19,00	1.200.000	4,00

Kinerja Urusan Pangan masih Rendah dan Sangat Rendah, untuk kinerja fisik dan keuangan. Hal ini menjadi perhatian khusus terutamanya dalam mendukung Ketahanan Pangan. Namun demikian produksi pangan Kabupaten Rembang untuk ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan selalu terjaga. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan informasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang, serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan local. Di setiap wilayah kecamatan, berupaya membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping penyuluh pertanian.

4. Urusan Wajib Pertanian

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada
Urusan Wajib Pertanian s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pertanian	200.000.000	130.000.000	25,92	12.262.750	9,43
91	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	150.000.000	80.000.000	19,47	3.579.750	4,47
92	Program Penyelesaian konflik- konflik pertanian	50.000.000	50.000.000	32,37	8.683.000	17,37

Realiasi Urusan Pertanian baik kinerja fisik maupun keuangan masih Rendah dan Sangat Rendah. Yang menjadi kendala adalah update informasi pertanian sehingga ini menjadi perhatian bersama dalam menyampaikan administrasi pertanian. Konflik-konflik pertanian di Kabupaten Rembang relatif dapat diselesaikan secara musyawarah.

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Lingkungan Hidup	11.985.000.000	5.715.376.000	35,28	535.977.361	1,00
93	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.625.000.000	3.758.376.000,00	24,56	282.582.759,00	7,52
94	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.095.000.000	777.000.000,00	33,56	74.257.850,00	9,56
95	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	315.000.000	45.000.000,00	111,22	8.350.000,00	18,56
96	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	55.000.000	100.000.000,00	15,00	96.217.000,00	96,22
97	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	75.000.000	50.000.000,00	15,00	0,00	0,00
98	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	75.000.000	50.000.000,00	15,00	0,00	0,00
99	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	90.000.000	65.000.000,00	68,37	34.690.500,00	53,37
100	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	605.000.000	825.000.000,00	19,83	39.879.252,00	4,83
101	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	50.000.000	45.000.000	15,00	0	0,00

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup masih Sangat Rendah dan Sedasng untuk serapan anggaran dan kinerja fisiknya. Kebijakan Pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup kedepan menjadi fokus Kabupaten Rembang untuk meraih ADIPURA. Selain agar lebih mendukung terhadap upaya pencapaian penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim, serta terus mendorong terbentuknya Bank sampah secara swadaya dimasyarakat, serta renponsif terhadap issue Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan lebih meningkatkan peran masyarakat didalamnya.

6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.827.850.000	2.556.537.250	48,23	664.879.080	26,00
102	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.778.850.000	2.541.537.250	40,92	658.796.430	25,92
103	Program Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan	49.000.000	15.000.000	55,55	6.082.650	40,55

Pencapaian kinerja pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk fisik dan keuangan secara berurutan Tinggi dan Rendah. Pelayanan administrasi kependudukan senantiasa terus ditingkatkan. Sehubungan dengan adanya dana DAK Non Fisik, proses pencairannya membutuhkan proses. Namun demikian pelayanan Adminduk masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya mengingat :

1. Kepemilikan dokumen kependudukan belum 100% baik kepemilikan KTP elektronik maupun akte kelahiran serta adanya peningkatan jumlah penduduk, mutasi pindah datang penduduk dan peristiwa kematian.
2. Pelayanan Kecamatan yang memiliki jaringan internet kurang stabil.

Sehingga diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan :
 - a. Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP elektronik melalui pelayanan perekaman jemput bola.
 - b. Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran dengan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran pada tahun 2019.
2. Meningkatkan kualitas jaringan internet hingga kecamatan agar proses Adminduk dapat berjalan lancar.

7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.852.649.000	7.710.190.000	27,03	1.112.177.117	14,42
104	Program Keluarga Berencana	13.065.649.000	6.285.190.000	30,26	6.285.190.000	15,26
105	Program Pelayanan Kontrasepsi	143.000.000	73.000.000	41,70	73.000.000	26,70
106	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1.209.000.000	1.197.000.000	25,16	1.197.000.000	10,16
107	Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	200.000.000	45.000.000	15,00	45.000.000	0,00
108	Program Ketahanan Keluarga	175.000.000	75.000.000	20,18	75.000.000	5,18
109	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	30.000.000	30.000.000	41,93	30.000.000	26,93
110	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	30.000.000	5.000.000	15,00	5.000.000	0,00

Secara umum, kinerja fisik maupun keuangan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rendah dan Sangat Rendah. Hal ini terlihat dari adanya program yang serapannya masih nol. Hal ini dikarenakan masih dalam proses pencairan. Secara umum pelaksanaan kegiatannya tidak terdapat permasalahan pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun demikian perlu kiranya untuk meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.

8. Urusan Wajib Perhubungan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perhubungan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perhubungan	23.318.500.000	5.417.580.000	29,38	457.201.995	8,43
111	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7.290.000.000	2.372.580.000	17,26	53.594.675	2,26
112	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	11.224.500.000	725.000.000	38,19	168.106.020	23,19
113	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.924.000.000	1.295.000.000	15,00	0	0,00
114	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	770.000.000	150.000.000	15,39	579.000	0,39

115	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	180.000.000	230.000.000	23,25	18.985.000	8,25
116	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan lalu Lintas	515.000.000	395.000.000	53,55	152.285.850	38,55
117	Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran	215.000.000	150.000.000	57,43	63.651.450	42,43
118	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200.000.000	100.000.000	15,00	0	0,00

Pelaksanaan program di Urusan Perhubungan memiliki kinerja fisik dan keuangan dengan kriteria Rendah dan Sangat Rendah. Program peningkatan pelayanan angkutan secara serapan anggaran masih nol meskipun secara pekerjaan sudah dilaksanakan. Kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk merupakan fokus pelayanan Dinas Perhubungan. Kabupaten Rembang relative lebih berhasil dalam mengelola manajemen transportasi melalui peningkatan sarpras perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalulintas, rekayasa transportasi, dan penggunaan moda transportasi massal.

Kedepan perlu dilakukan peningkatan Jumlah trayek ranting dalam rangka mengcover pelayanan angkutan umum di seluruh wilayah Kabupaten Rembang, disamping peningkatan sarana pendukung pelayanan berlalu lintas, selain itu juga pengendalian dan pengawasan angkutan online, sehingga antara angkutan konvensional dan online dapat bersinergi dalam meningkatkan pelayanan dibidang transportasi.

9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Komunikasi Dan Informatika sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Komunikasi Dan Informatika	4.726.000.000	4.486.000.000	33,62	667.166.850	14,87
119	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.815.000.000	1.650.000.000	19,87	80.423.400	4,87
120	Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi	110.000.000	95.000.000	51,11	34.303.150	36,11
121	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	2.620.000.000	2.570.000.000	34,97	513.198.600	19,97
122	Program Kerjasama informasi dan media massa	49.000.000	49.000.000	15,00	0	0,00
123	Program peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika	132.000.000	122.000.000	47,17	39.241.700	32,17

Secara umum pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang pada kinerja fisik dalam kategori Sedang, sedangkan realisasi keuangannya masuk kategori Sangat Rendah. Meskipun demikian, kinerja urusan Komunikasi dan Informatika sudah melakukan integrasi beberapa system informasi pemerintahan yang ada, makin berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Rembang, , penanganan pengaduan dengan system lapor yang telah sesuai dengan SOP, dan aksesibilitas Informasi Publik yang luas tersebar di seluruh Kecamatan.

Untuk itu kebutuhan akan pemanfaatan teknologi Informasi di segala bidang dinamikanya sangatlah tinggi, sehingga masih perlu dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam mengelola jaringan komunikasi dan teknologi informasi.

10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki program-program yang didalamnya yang mencakup 2 sub bidang yaitu Koperasi dan UKM. Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.112.000.000	947.000.000	38,43	146.933.030	15,51
124	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	280.000.000	240.000.000	23,55	20.524.800	8,55
125	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	135.000.000	130.000.000	18,15	4.100.000	3,15
126	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	310.000.000	300.000.000	25,79	32.359.430	10,79
127	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	200.000.000	100.000.000	21,06	6.063.000	6,06
128	Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha	25.000.000	25.000.000	95,89	22.722.000	90,89
129	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	112.000.000	112.000.000	69,61	61.163.800	54,61
130	Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru	50.000.000	40.000.000	15,00	0	0,00

Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk fisiknya dengan katoegori Sedang, namun realisasinya masih Sangat Rendah. Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diperlukan upaya:

- a. Secara berkesinambungan memfasilitasi pengelola Koperasi untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Koperasi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usahanya, pemahaman dalam aturan aksesibilitas permodalan, serta perluasan jangkauan pemasaran produk usaha mikro melalui online.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Penanaman Modal Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Penanaman Modal Daerah	1.850.000.000	1.107.720.000	34,67	349.021.479	31,50
131	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	135.000.000	205.000.000	16,68	3.450.000	1,68
132	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	285.000.000	185.000.000	36,83	40.377.309	21,83
133	Program Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	45.000.000	25.000.000	15,00	0	0,00
134	Program Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	105.000.000	80.000.000	43,83	23.061.000	28,83
135	Program Pelayanan dan Pengendalian Pelayanan Perijinan	1.280.000.000	612.720.000	61,05	282.133.170	46,05

Pada tabel tersebut diatas, kinerja fisik urusan Penanaman Modal dalam kategori Sedang. Untuk realisasi keuangannya masih Rendah. Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Penanaman Modal, masih perlu dilakukan sosialisasi bagi pengusaha terkait kegiatan efisiensi pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Rembang, beserta pengendaliannya disampaikan secara luas kepada masyarakat. Disamping itu perlu dilakukan upaya-upaya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta peningkatan iklim Investasi melalui event-event nasional mengingat potensi investasi berbagai bidang di Rembang.

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib
Kepemudaan Dan Olahraga s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Kepemudaan Dan Olahraga	4.830.000.000	2.720.950.000	46,66	705.463.473	25,92
136	Program Pengembangan dan Peningkatan Keserasian Kebijakan Pemuda	1.075.000.000	1.140.950.000	41,49	302.216.592	26,49
137	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	15.000.000	15.000.000	80,00	9.750.000	65,00
138	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.640.000.000	1.365.000.000	42,74	378.646.881	27,74
139	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.100.000.000	200.000.000	22,43	14.850.000	7,43

Untuk kinerja fisik Urusan Kepemudaan Dan Olahraga adalah Sangat Tinggi. Sedangkan untuk kinerja realisasi keuangannya masih Sangat Rendah. Meskipun capaian fisik pembangunan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dinilai sudah cukup baik, namun untuk lebih meningkatkan geliat dan prestasi dibidang kepemudaan dan olahraga perlu dilakukan :

- a. Perlunya regulasi tentang Kepemudaan, dan menggalakkan kegiatan yang dapat mengedukasi dan mengembangkan minat bakat pemuda melalui pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial;
- b. Perbaiki, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan prasarana olahraga yang ada, sekaligus optimalisasi peran ruang publik dan taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga sebagai area olahraga.

13. Urusan Wajib Statistik

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib
Statistik s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Statistik	180.000.000	135.000.000	20,57	7.526.000	5,57
140	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	180.000.000	135.000.000	20,57	7.526.000	5,57

Kinerja Urusan Statistik secara umum dalam penyelenggaraan baik realisasi fisik maupun keuangan penyelenggaraan masih perlu ditingkatkan karena Sangat Rendah. Tingkat ketersediaan data statistik yang kurang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang

dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan data dengan baik. Minimnya akses dan ketersediaan terhadap data statistik dasar dan sektoral, dan belum adanya sistem yang baik untuk pengolahan dan pengelolaan data secara terpadu dapat mempengaruhi proses pembangunan. Dengan terbitnya PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA tentunya menguatkan fungsi Urusan Statistik untuk mengawal data.

14. Urusan Wajib Persandian

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Persandian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Persandian	30.000.000	25.000.000	39,82	6.206.000	24,82
141	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	30.000.000	25.000.000	39,82	6.206.000	24,82

Kinerja Urusan Persandian baik fisik maupun keuangannya masih Rendah dan Sangat Rendah. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja urusan Persandian, perlu dilakukan upaya :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas *software* keamanan informasi untuk melindungi server dalam rangka antisipasi gangguan.
- Menambah jumlah dan kualitas SDM dalam bidang keamanan informasi dan persandian.

15. Urusan Wajib Kebudayaan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Kebudayaan	1.710.000.000	1.205.000.000	21,98	86.309.378	7,16
142	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	820.000.000	538.000.000	25,84	58.312.500	10,84
143	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	180.000.000	220.000.000	15,00	0	0,00
144	Program Pembinaan Sejarah Lokal	330.000.000	200.000.000	17,79	5.585.000	2,79
145	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	130.000.000	117.000.000	17,23	2.608.878	2,23
146	Program Pengembangan Nilai Budaya	140.000.000	60.000.000	47,17	19.303.000	32,17
147	Program Pembinaan Kesenian Masyarakat	100.000.000	60.000.000	15,83	500.000	0,83
148	Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	10.000.000	10.000.000	15,00	0	0,00

Kinerja Urusan Kebudayaan baik kinerja fisik maupun keuangan adalah masih Sangat Rendah. Urusan Kebudayaan sedikit banyak ikut memiliki andil dalam mempromosikan pariwisata. Untuk lebih mendukung misi Kabupaten Rembang dalam mengembangkan budaya lokal perlu terus dilakukan upaya-upaya :

- a. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mengenal lebih dalam budaya lokal, melalui media yang sesuai dengan perkembangan jaman.
- b. Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif di lembaga sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.
- c. Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat dengan mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.

16. Urusan Wajib Perpustakaan

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perpustakaan	26.020.500.500.000	3.667.450.000	40,37	487.133.000	13,28
149	Program Pengembangan Budaya Baca	500.000.000	3.387.450.000	26,10	376.110.000	11,10
150	Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	25.520.500.000	280.000.000	54,65	111.023.000	39,65

Kinerja Urusan Perpustakaan terkait fisiknya dengan kategori Tinggi. Sedangkan dari segi realisasi keuangannya Sangat Rendah. Untuk meningkatkan kinerja Urusan Perpustakaan difokuskan pada bagaimana menarik minat baca dan budaya baca serta meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, perlu dilakukan :

- a. Penyelenggaraan event-event dibidang kepustakaan, peningkatan kapasitas SDM dibidang pustakawan serta modernisasi sarana prasarana yang tersedia sehingga dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap.
- b. Penambahan gedung perpustakaan yang representative, yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital sehingga menarik minat pengunjung baik nyata maupun *online*.
- c. Memberikan waktu lebih kepada siswa-siswi di semua jenjang pendidikan untuk mempergunakan waktu istirahatnya dengan gemar membaca buku di perpustakaan sekolah.

17. Urusan Wajib Kearsipan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kearsipan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Kearsipan	500.000.000	6.058.250.000	24,51	555.221.930	9,16
151	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	200.000.000	2.130.400.000	15,00	0	0,00
152	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	50.000.000	1.983.050.000	15,39	7.663.000	0,39
153	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	250.000.000	1.944.800.000	43,16	547.558.930	28,16

Secara umum kinerja Urusan Kearsipan dalam kategori Rendah dan Sangat Rendah. Hal ini disebabkan karena dalam perbaikan sistem administrasi kearsipan masih dalam tahap lelang. Perbaikan sistem ini untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam mencari arsip beberapa tahun sebelumnya.

Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Kearsipan, perlu dilakukan :

- 1) Pengembangan digitaly arsip (Sistem Administrasi Kearsipan), untuk mengantisipasi keterbatasan tempat penyimpanan dalam gedung arsip,
- 2) Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan tenaga arsiparis.

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Triwulan II

	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.086.874.000	4.380.000.000	43,23	1.294.607.883	29,55
154	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	186.600.000	160.000.000	57,73	68.362.600	42,73
155	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	225.000.000	158.000.000	50,16	55.558.530	35,16
156	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	170.000.000	132.000.000	48,44	44.138.000	33,44
157	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	6.510.474.000	1.522.500.000	39,17	367.921.934	24,17
158	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	290.000.000	207.000.000	20,32	11.012.250	5,32
159	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	1.181.600.000	1.385.000.000	46,55	437.023.480	31,55
160	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	503.200.000	795.500.000	54,04	310.591.089	39,04
161	Program peningkatan peran serta perempuan di perdesaan	10.000.000	10.000.000	15,00	0	0,00
162	Program Penanggulangan kemiskinan	10.000.000	10.000.000	57,73	0	0,00

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait fisik dalam kategori Tinggi. Sedangkan untuk realisasi keuangannya masih Rendah. Yang menjadi perhatian adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan diperdesaan dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan :

- a. Memberikan peran kepada perempuan untuk ikut aktif dalam pembangunan di desa.
- b. Dalam penanggulangan kemiskinan di desa, mengupayakan setiap proses pembangunan dapat dilakukan secara padat karya untuk memaksimalkan potensi SDM di desa.

D. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kelautan Dan Perikanan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPd Tahun 2019 pada Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan s.d Triwulan II

	Urusan / Program	Anggaran RKPd	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Kelautan Dan Perikanan	6.584.403.000	7.696.031.000	59,81	2.497.570.570	32,45
163	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	8.533.000.000	1.375.478.000	20,68	78.131.850	5,68
164	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	151.200.000	126.200.000	24,77	12.327.000	9,77
165	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	415.000.000	240.000.000	59,86	107.668.000	44,86
166	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	400.000.000	50.000.000	15,00	0	0,00
167	Program pengembangan nelayan kecil	16.615.000.000	964.082.000	15,74	7.150.000	0,74
168	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha	450.000.000	250.000.000	15,00	0	0,00
169	Program Pengelolaan TPI Terpadu	24.500.000.000	11.279.848.000	34,93	2.248.626.332	19,93

Kinerja fisik Urusan Kelautan dan Perikanan adalah Sangat Tinggi, sedangkan kinerja keuangannya adalah Sedang. Meskipun demikian permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

- a. Rendahnya produksi perikanan budidaya karena pembudidaya ikan belum menerapkan cara budi daya ikan yang benar.
- b. Belum optimalnya produksi ikan olahan, karena nelayan dan pembudi daya ikan banyak yang belum tahu cara mengolah ikan yang layak jual.
- c. Permasalahan yang ada yaitu rendahnya produksi perikanan

tangkap karena sumber daya ikan di laut berkurang dengan masih adanya penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah :

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang Cara Pembenihan Ikan yang Benar dan Cara Budidaya Ikan yang Benar kepada kelompok pembenihan dan pembudidaya ikan.
- b. Memanfaatkan lahan tidur yang dekat sumber air untuk budidaya ikan air tawar, serta melakukan perlindungan tambak dari abrasi dengan penanaman mangrove.
- c. Melakukan pelatihan pengolahan ikan bagi istri nelayan dan pembudidaya ikan air tawar yang tergabung dalam Industri Rumahan bagi Perempuan nelayan, serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pariwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pariwisata	35.285.000.000	6.138.705.000	47,00	761.822.133	32,00
170	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.145.000.000	765.800.000	57,30	323.916.600	42,30
171	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	32.385.000.000	4.817.905.000	19,00	192.620.783	4,00
172	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	480.000.000	255.000.000	26,80	30.083.400	11,80
173	Program pengembangan ekonomi kreatif	1.275.000.000	300.000.000	86,73	215.201.350	71,73

Kinerja fisik Urusan Pariwisata sangat baik yaitu dengan kategori Sangat Tinggi. Namun berbeda halnya dengan realisasi keuangannya yaitu Sangat Rendah, hal ini dikarenakan proses pencairan keuangan kegiatan dan lelang paket pekerjaan masih dalam proses.

Dalam perkembangannya Urusan Pariwisata perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian dalam meningkatkan investasi. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata, yaitu :

- a. Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap, termasuk petunjuk arah menuju obyek wisata.
- b. Promosi pariwisata (paket wisata) masih kurang maksimal, terutamanya dengan paket wisata dengan kabupaten sekitar.

- c. Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata, serta belum semua pelaku wisata telah bersertifikasi.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan;

Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata, serta petunjuk arah menuju obyek wisata.
- b. Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata.
- c. Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata dengan meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata.
- d. Melakukan koordinasi dengan asosiasi kepariwisataan antara lain PHRI, ASITA untuk mengupdate data keanggotaan sehingga sumber daya manusia kepariwisataan menjadi lebih baik.

3. Urusan Pilihan Pertanian

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pertanian	97.937.500.000	45.978.914.346	37,00	6.541.131.050	22,00
174	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.300.000.000	2.020.085.173	30,78	318.776.100	15,78
175	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7.547.500.000	5.342.500.000	92,36	4.133.163.000	77,36
176	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1.392.500.000	791.000.000	30,47	122.355.300	15,47
177	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	780.000.000	477.454.173	34,51	93.134.325	19,51
178	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.710.000.000	420.000.000	29,64	61.480.000	14,64
179	Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.940.000.000	1.202.500.000	19,51	54.180.600	4,51
180	Program Pengembangan Agribisnis	1.320.000.000	652.000.000	48,37	217.583.250	33,37
181	Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	73.620.000.000	30.773.375.000	17,95	908.007.275	2,95
182	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)	5.327.500.000	4.300.000.000	29,71	632.451.200	14,71

Kinerja keuangan Urusan Pertanian masih Sangat Rendah. Namun secara fisik, progres pekerjaan masuk kategori Sedang. Dalam pembangunan pertanian dihadapi berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Sistem organisasi dan manajerial kelompok tani belum optimal, ditambah lagi keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan dalam pembinaan petani.

- b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian seperti pemukiman, kawasan bisnis dan industri.
- c. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dam parit, transportasi, dan unit pengolahan belum optimal.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan urusan pilihan pertanian antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan memberdayakan penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani sendiri.
- b. Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk budidaya pertanian.
- c. Meningkatkan infrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi terutama pada jaringan irigasi, embung, dam parit dan jalan pertanian.

4. Urusan Pilihan Perdagangan

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perdagangan	112.075.400.000	7.667.272.000	40,00	1.192.056.789	25,00
183	Program Peningkatan Kemetrolagian dan perlindungan Konsumen	430.000.000	787.000.000	75,48	475.999.761	60,48
184	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	170.000.000	50.000.000	75,03	30.015.789	60,03
185	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	10.503.200.000	4.151.772.000	16,31	54.269.500	1,31
186	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	100.000.000	100.000.000	15,00	0	0,00
187	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi	92.820.000.000	1.670.000.000	36,06	351.752.103	21,06
188	Program Pengembangan Sistem Distribusi	289.200.000	200.000.000	49,94	69.875.838	34,94
189	Program Pembinaan Pedagang	6.472.000.000	15.000.000	15,00	0	0,00
190	Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan	16.000.000	16.000.000	15,00	0	0,00
191	Program Promosi Produk Unggulan Daerah	1.225.000.000	652.500.000	45,77	200.784.898	30,77
192	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	50.000.000	25.000.000	52,44	9.358.900	37,44

Kinerja fisik Urusan Perdagangan sudah baik (Tinggi). Akan tetapi kinerja keuangannya masih Sangat Rendah. Dengan adanya sistem non tunai dalam proses barang dan jasa, sedikit mempengaruhi kegiatan yang berjalan. Belum siapnya SDM pemerintah dalam proses tersebut.

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk oleh pelaku usaha di

Kabupaten Rembang.

- b. Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional, disisi lain pertumbuhan pasar/toko modern tidak terkendali.
- c. Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan.

Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbanyak kegiatan pameran di luar daerah serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk, serta meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan.
- b. Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional;
- c. Meningkatkan pengawasan perijinan dan pengaturan pasar/toko modern;
- d. Meningkatkan kegiatan penertiban dan penataan PKL;

5. Urusan Pilihan Perindustrian

Kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perindustrian	1.890.000.000	4.665.000.000	39,00	388.747.600	25,00
193	Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi	350.000.000	300.000.000	50,24	105.714.000	35,24
194	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	470.000.000	3.100.000.000	15,00	0,00	0,00
195	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	70.000.000	70.000.000	23,75	6.125.000	8,75
196	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	50.000.000	50.000.000	38,59	11.794.000	23,59
197	Program Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri	50.000.000	50.000.000	112,21	48.606.000	97,21
198	Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif	470.000.000	470.000.000	37,43	105.444.300	37,43
199	Pembinaan Lingkungan Sosial	275.000.000	470.000.000	36,10	105.444.300	21,10
200	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah	100.000.000	100.000.000	20,62	5.620.000	5,62
201	Program Pembinaan Industri	55.000.000	55.000.000	15,00	0,00	0,00

Kinerja Urusan Perindustrian secara berurutan adalah Tinggi (untuk kinerja fisik) dan Sangat Rendah (kinerja keuangan). Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas produk dan desain produk yang dihasilkan oleh IKM serta alat/mesin produksi yang digunakan masih banyak menggunakan alat/mesin manual/tradisional.

- b. Masih banyak produk IKM yang belum ber-SNI dikarenakan rendahnya pemahaman tentang SNI serta masih tingginya biaya pengurusan SNI.
- c. Rendahnya strategi pemasaran produk IKM.

Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan dalam Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pelatihan tentang peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pelatihan kreativitas desain produk serta sosialisasi terkait dengan banlat/hibah/bansos.
- b. Sosialisasi dan fasilitasi tentang SNI.
- c. Sosialisasi tentang manajemen produksi/manajemen perusahaan.
- d. Perlunya pelatihan pemasaran serta teknik/strategi pemasaran lainnya.

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

Kinerja fisik dan keuangan pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik (%)	Keuangan (APBD)	
					(Rp)	(%)
	Sekretariat Daerah	34.877.103.000	27.400.080.000	41,02	6.931.061.252	25,29
202	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	3.485.000.000	3.473.000.000	36,34	741.004.368	21,34
203	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.155.000.000	675.000.000	44,25	197.445.033	29,25
204	Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	1.307.000.000	1.100.780.000	63,86	537.788.720	48,86
205	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	4.860.000.000	3.755.300.000	30,65	587.669.366	15,65
206	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	23.215.103.000	17.698.600.000	41,41	4.674.738.729	26,41
207	Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	345.000.000	270.000.000	54,20	105.840.000	39,20
208	Program Kerjasama Pembangunan	123.000.000	148.000.000	42,52	40.726.665	27,52
209	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	72.000.000	72.000.000	44,34	21.125.371	29,34
210	Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	140.000.000	110.000.000	35,78	22.863.000	20,78
211	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.000.000	97.400.000	16,91	1.860.000	1,91

Kinerja fisik Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan masih baik (Tinggi). Namun begitu untuk realisasi keuangannya masih Rendah. Secara umum permasalahan pada Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah belum berjalan optimal. Disamping pelaksanaan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah juga belum optimal.

Upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah adalah :

- a. Menjalankan fungsi koordinator dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat kerja daerah.
- b. Melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.
- c. menjalankan strategi manajemen Sekretariat Daerah yaitu meningkatkan aparatur sekretariat daerah yang profesional, disiplin dan penuh tanggungjawab, mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima, transparan, dan akuntabel, meningkatkan sistem informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

2. Kepegawaian Daerah

Kinerja fisik dan keuangan pada Kepegawaian Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Kepegawaian Daerah s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	7.271.652.000	6.757.270.200	51,00	2.924.363.099	36,00
212	Program Pendidikan Kedinasan	337.500.000	362.950.000	31,09	58.385.726	16,09
213	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.552.133.000	3.410.750.000	40,72	877.337.052	25,72
214	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	1.382.019.000	2.983.570.200	81,65	1.988.640.321	66,65

Kinerja Kepegawaian Daerah secara beruntun adalah kategori Sangat Tinggi untuk kinerja fisiknya dan kategori Sedang untuk kinerjanya keuangannya.

Secara umum permasalahan utama dalam menjalankan fungsi Kepegawaian Daerah antara lain :

- a. Adanya moratorium penerimaan CPNS mengakibatkan beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan penerimaan pegawai kontrak/pegawai non ASN.
- b. Belum terselesaikannya proses inpassing nomenklatur jabatan.
- c. Masih Adanya PNS Tugas Belajar yang belum selesai tepat waktu.
- d. Penyusunan sistem tambahan penghasilan pegawai yang belum berdasarkan kelas jabatan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- a. Memantau Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang yang melaksanakan penerimaan pegawai kontrak / pegawai non ASN dengan mengevaluasi secara berkala.
- b. Melaksanakan percepatan inpassing nomenklatur jabatan melalui asistensi maupun rapat koordinasi berkala.
- c. Memberikan teguran kepada PNS yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan Tugas Belajarnya;
- d. Menyusun kajian sistem tambahan penghasilan pegawai yang berdasarkan kelas jabatan dengan melibatkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang dalam perumusannya.

3. Sekretariat DPRD

Kinerja fisik dan keuangan pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada
Sekretariat DPRD s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Sekretariat DPRD	23.257.224.000	26.759.297.000	43,00	7.492.517.356	28,00
215	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	23.257.224.000	26.759.297.000	43,00	7.492.517.356	28,00

Kinerja Sekretariat Daerah untuk kinerja fisiknya adalah Tinggi. Sedangkan kinerja keuangannya masih Rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Sering berubahnya Peraturan Per-undang-undangan di tingkat pusat sebagai acuan penyusunan produk hukum daerah, selain itu adanya tumpang tindih antara Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat yang menghambat dalam implementasi Produk Hukum Daerah.
- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana menjadi kendala belum optimalnya penyusunan Standar Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial pada seluruh Perangkat Daerah.
- c. Belum semua area perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan pembinaan secara optimal.
- d. Masih terdapat Perangkat Daerah belum menetapkan

keputusan Standar Operasional Prosedur.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum, disamping itu juga akan ditingkatkan Sosialisasi dan publikasi Produk Hukum agar dapat menjangkau seluruh permasalahan hukum Aparat Pemerintah dan lapisan masyarakat;
- b. Penerapan system aplikasi Analisa Jabatan untuk meningkatkan kinerja penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- c. Diperlukan adanya asistensi penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah.

4. Pengawasan

Kinerja fisik dan keuangan pada Pengawasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Pengawasan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Pengawasan	8.648.795.000	4.571.930.000	44,00	1.970.696.470	29,00
216	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	7.957.370.000	4.380.455.000	59,06	1.930.067.770	44,06
217	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	232.900.000	95.200.000	57,68	40.628.700	42,68
218	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	458.525.000	96.275.000	15,00	0	0,00

Kinerja Pengawasan untuk realisasi keuangannya masih Rendang. Sedangkan untuk kinerja fisiknya adalah Tinggi. Dalam pelaksanaan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan masih belum terlaksana dengan baik.

Secara umum permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ,antara lain :

1. Masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa obrik dan masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaaan.
2. Belum optimalnya inplementasi SPIP dan belum efektifnya penerapan SPIP disemua OPD dalam membuat RTP dan register resiko.
3. Masih belum memadainya kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga masih ditemui kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP.

Untuk mengatasi permasalahan tsb, kedepan akan diupayakan:

1. Meningkatkan komitmen obrik dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas rekomendasi hasil pemeriksanaan dengan obrik terkait.
2. Menerapkan strategi peningkatan komitmen implementasi SPIP.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan beberapa cara yaitu :
 - a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, disamping secara mandiri harus meningkatkan kompetensi diri serta melakukan pelatihan kantor sendiri (PKS) dari pegawai yang mengikuti diklat.
 - b. Komitmen pimpinan dan seluruh komponen dalam bersama-sama meningkatkan kinerja mencapai tujuan penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP yang memadai.

5. Keuangan Daerah

Kinerja fisik dan keuangan pada Keuangan Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada
Keuangan Daerah s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Keuangan	12.504.650.000	14.058.575.000	52,00	7.072.562.522	37,00
219	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.000.000	45.000.000	40,26	11.368.500	25,26
220	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.177.250.000	3.750.000.000	40,32	949.684.754	25,32
221	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	7.279.400.000	10.263.575.000	74,55	6.111.509.268	59,55

Kinerja Kuangaan Daerah di Kabupaten Rembang secara umum adalah Sangat Tinggi untuk kinerja fisiknya dan termasuk Sedang untuk realisasi keuangannya. Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu diperhatikan terhadap obyek-obyek yang memungkinkan menjadi sumber pendapatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Integrasi system pengelolaan keuangan On Line belum optimal Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
- b. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment dalam pembayaran pajak serta kurang tanggapnya wajib pajak terhadap pembayaran pajak dengan system online .
- c. Penatausahaan Retribusi belum optimal karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Kekayaan Daerah belum mengakomodir semua objek retribusi.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengembangan SIMDA dan Integrasi SIM lainnya.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak restoran, pajak hiburan dan akan dilakukan terhadap semua obyek pajak daerah.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang.
- d. Untuk kebutuhan regulasi jangka panjang menyusun Perubahan Peraturan Daerah Retribusi yang mengakomodir semua objek retribusi dan untuk jangka pendek disusun Peraturan Walikota mengenai Penarikan Retribusi.

6. Perencanaan Pembangunan

Kinerja fisik dan keuangan pada Perencanaan Pembangunan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Perencanaan Pembangunan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
				(%)	(Rp)	(%)
	Perencanaan Pembangunan	9.955.000.000	5.756.100.000	34,00	1.561.196.507	19,00
222	Program Pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan	650.000.000	384.000.000	28,59	52.191.800	13,59
223	Program Penelitian dan Pengembangan Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	930.000.000	793.000.000	29,66	116.233.400	14,66
224	Program Perencanaan pembangunan daerah	2.150.000.000	1.212.500.000	48,65	407.972.000	33,65
225	Program Perencanaan pembangunan ekonomi	1.000.000.000	565.000.000	28,63	76.985.545	13,63
226	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	1.625.000.000	705.000.000	34,18	135.236.800	19,18
227	Program Kerjasama Pembangunan	750.000.000	244.100.000	33,27	44.602.700	18,27
228	Program Pengembangan wilayah perbatasan	40.000.000	30.000.000	29,94	4.482.383	14,94
229	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	50.000.000	50.000.000	15,00	0	0,00
230	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.035.000.000	610.000.000	40,87	157.812.879	25,87
231	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	30.000.000	20.000.000	19,48	895.800	4,48
232	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000	500.000.000	63,12	240.624.000	48,12
233	Program Perencanaan Tata Ruang	30.000.000	20.000.000	15,00	0	0,00

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik	Keuangan (APBD)	
					(%)	(Rp)
234	Program Pemanfaatan Ruang	30.000.000	20.000.000	25,38	2.076.000	10,38
235	Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	330.000.000	72.500.000	35,56	14.905.000	20,56
236	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	100.000.000	50.000.000	16,69	844.200	1,69
237	Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	955.000.000	480.000.000	78,82	306.334.000	63,82

Kinerja Perencanaan Pembangunan untuk kinerja fisiknya termasuk Sedang. Untuk kinerja keuangannya masih Sangat Rendah, hal ini dikarenakan proses Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan Perencanaan Tata Ruang didalam dokumen RTRW sedang dalam proses reviu.

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Perencanaan Pembangunan, diantaranya :

- Perencanaan penganggaran belum menganut “*e-performance based budgeting*”, sehingga belum sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam merencanakan anggarannya.
- Hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pengembangan wilayah, pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, serta pengembangan ekonomi daerah.

Rencana Tindak lanjut yang akan diambil adalah :

- Secara bertahap menanamkan mind set bagi Perangkat Daerah untuk tidak sekedar menghabiskan anggaran, namun bekerja untuk bisa memberikan hasil/dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- Meningkatkan publikasi Jurnal Riptek, Lomba Krenova Kabupaten Rembang, serta publikasi dan sosialisasi hasil kelitbangan, disamping pula selalu meningkatkan kualitas hasil-hasil penelitian .
- Meningkatkan intensitas dalam berkoordinasi, baik internal di Bappeda, maupun secara eksternal dengan Perangkat Daerah, serta menggunakan tenaga ahli dalam workshop dari berbagai Perguruan Tinggi.

7. Penunjang Pemerintah Kecamatan

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Penunjang Pemerintah Kecamatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2019 pada Penunjang

Pemerintah Kecamatan s.d Triwulan II

No	Urusan / Program	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Capaian Kinerja		
				Fisik (%)	Keuangan (APBD)	
					(Rp)	(%)
	Penunjang Pemerintah Kecamatan	10.291.089.000	11.609.808.000	25.49	1.941.988.036	16,73
238	Program Penunjang Pemerintah Kecamatan	10.291.089.000	11.609.808.000	25.49	1.941.988.036	16,73

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Penunjang Pemerintah Kecamatan, diantaranya :

- a. Jaringan internet yang tidak stabil untuk wilayah kecamatan;
- b. Belum optimalnya SDM dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- c. Masih minimnya keinginan masyarakat untuk mengurus dokumen pribadi maupun keluarga.